

**PENDAPATAN MINERAL DAN KINERJA
PEREKONOMIAN REGIONAL: SEBUAH ANALISIS
MENGUNAKAN *SUSTAINABLE BUDGET INDEX***



SKRIPSI

**Diajukan untuk
memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh:
Charamina Sulistiowati
2014110031**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2019**

**MINERAL REVENUE AND REGIONAL ECONOMIC
PERFORMANCE: AN ANALYSIS USING
SUSTAINABLE BUDGET INDEX**



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete part of the requirements for
Bachelor Degree in Economics

By
Charamina Sulistiowati
2014110031

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN DEVELOPMENT ECONOMICS**
Accredited by National Accreditation Agency No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
**BANDUNG
2019**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN**



PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENDAPATAN MINERAL DAN KINERJA
PEREKONOMIAN REGIONAL: SEBUAH ANALISIS
MENGUNAKAN *SUSTAINABLE BUDGET INDEX***

Oleh:
Charamina Sulistiowati
2014110031

Bandung, Juli 2019

Ketua Program Sarjana Ekonomi Pembangunan,

Ivantia S. Mokoginta, Ph.D.,

Pembimbing,

Hilda Leilani Masniaritta Pohan, Ph.D

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Charamina Sulistiowati
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 19 Juli 1995
NPM : 2014110031
Program studi : Ekonomi Pembangunan
Jenis Naskah : Skripsi

JUDUL

PENDAPATAN MINERAL DAN KINERJA PEREKONOMIAN REGIONAL:
SEBUAH ANALISIS MENGGUNAKAN *SUSTAINABLE BUDGET INDEX*

Pembimbing : Hilda Leilani Masniaritta Pohan, Ph.D.

MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003:
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal: 18 Juli 2019

Pembuat pernyataan:



Charamina Sulistiowati

ABSTRAK

Pendapatan mineral berpotensi menjadi pendorong bagi kinerja perekonomian suatu wilayah. Pendapatan mineral yang berasal dari kegiatan ekstraksi perlu dikelola dengan tepat agar terhindar dari indikasi *resource curse*. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah diharapkan mengelola pendapatan mineral secara tepat sehingga berkontribusi pada kinerja perekonomian regional. *Sustainable budget index* adalah indikator untuk menentukan apakah suatu wilayah mengelola pendapatan mineral secara tepat. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan SBI guna menjelaskan penyebab mengapa sebuah wilayah meski kaya mineral, namun memiliki kinerja perekonomian yang buruk. Dengan menggunakan rumus SBI, hasil penelitian menunjukkan bahwa Papua, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah memiliki nilai SBI lebih kecil dari satu, sedangkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan memiliki nilai SBI lebih besar dari satu. Dengan menggunakan metode PLS, hasil regresi model tanpa DSBI menunjukkan variabel angka harapan hidup, investasi dan panjang jalan beraspal berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap PDRB kelima provinsi. Pada model dengan DSBI hasil regresi menunjukkan bahwa variabel angka harapan hidup, investasi, panjang jalan beraspal, rata-rata lama sekolah dan variabel indikator SBI berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap PDRB kelima provinsi.

Kata Kunci: Kinerja perekonomian, Pendapatan mineral, *Sustainable budget index*

ABSTRACT

Mineral revenue has the potential to be a driver for the economic performance of a region. Mineral revenue derived from extraction activities needs to be managed appropriately in order to avoid resource curse indications. East Kalimantan, South Kalimantan, Papua, South Sumatra and Central Java are expected to manage mineral revenues appropriately so that they contribute to regional economic performance. The Sustainable Budget Index is an indicator to determine whether a region manages mineral revenues appropriately. This study aims to utilize SBI to explain the reasons why a region is rich in minerals, but has poor economic performance. By using the SBI formula, the results of the study show that Papua, South Sumatra and Central Java have a SBI value smaller than one, while East Kalimantan and South Kalimantan have a SBI value greater than one. Using the PLS method, the results of the study on the model without DSBI showed that the variables life expectancy, investment and the length of paved roads had a positive and statistically significant effect on the GRDP of the five provinces. In the model with DSBI results showed that the variables life expectancy, investment, the length of paved roads, the average length of school and the SBI indicator variable had a positive and statistically significant effect on the GRDP of the five provinces.

Keywords: *Economic performance, Mineral income, Sustainable budget index*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pendapatan Mineral dan Kinerja Perekonomian Regional: Sebuah Analisis Menggunakan *Sustainable Budget Index*”**. Skripsi ini dibuat dan disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Sarjana Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan.

Selama proses menjalani perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, penulis menghadapi berbagai hambatan. Namun, hambatan yang ada menjadi motivasi bagi penulis agar dapat melewatinya hingga menjadi pribadi yang lebih baik. Hal tersebut dapat dicapai berkat bantuan, bimbingan, doa dan dukungan yang tidak ternilai dari berbagai pihak. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, (Alm) Papah Yanto dan Mamah Weny yang selalu memberikan doa, segala dukungan dalam bentuk apapun serta kasih sayang tiada henti bagi penulis. Terimakasih Dek Alfi, selaku adik penulis yang selalu memberikan drama selama penulis menyelesaikan skripsi. Terimakasih juga untuk kakak tersayang, Mas Yosie untuk segala nasihatnya dan dorongannya agar penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi. Tidak lupa, terimakasih juga untuk keponakan penulis, Kaka, Dek Devan dan terutama Mas Tapin yang selalu menjadi sumber tertawa penulis.
2. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih untuk seluruh doa dan motivasinya.
3. Ibu Hilda Leilani Masniaritta Pohan, Ph.D., selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih atas kesabaran luar biasa, perhatian dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis. Terimakasih juga telah memberikan bimbingan, ilmu, semangat, waktu dan wejangan kepada penulis saat menyusun skripsi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Miryam Bellina Lilian S.K. Wijaya, Dra., M.A., selaku dosen wali penulis. Terimakasih atas segala bimbingan, motivasi, nasihat dan arahan selama penulis melakukan perwalian.
5. Ibu Ivantia S. Mokoginta, Ph.D., selaku ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan. Terimakasih atas seluruh bimbingan dan pembelajaran selama masa perkuliahan.

6. Ibu Siwi Nugraheni, Dra., M.Env., Pak Ishak Somantri, Drs., MSP., Prof. Dr. Martinus Yuwana Marjuka, M.Si., dan Ibu Anna F. Poerbonegoro Dra., M.A. selaku dosen bidang kajian EKL. Terimakasih atas pembelajaran, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Seluruh dosen dan staff keluarga Ekonomi Pembangunan: Pak Aswin Masudi, S.E., MSE., Pak Chandra, S.E., M.M., M.Sc., Pak Charvin S.E., M.Sc., Pak Dr. Fransiscus Haryanto, Ibu Januarita Hendrani, Ph.D., Ibu Noknik Karliya Herawati, Dra., M.P., Pak Dian Fordian dan Pak Yohanes Eko Winamo. Terimakasih Bapak dan Ibu telah mengajarkan dan mendidik penulis tidak hanya materi saja melainkan juga dalam hal karakter.
8. HMPSEP 2016/2017. Terimakasih Andrew dan Nizar telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis menjadi salah satu pengurus organisasi yang kalian pimpin. Menjadi bagian dari suatu organisasi memberikan banyak pelajaran dan pengalaman bagi penulis.
9. Para tutor lantai empat, Kak Dikcit, Opi, Gelora, Andrew. Terimakasih untuk seluruh bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ekonomi Pembangunan 2013: Kak Mariska, Kak Imun, Kak Getha, Kak Fiat, Kak Rizal, Ka Nur, Ka Galih, dan Faza. Terimakasih telah memberikan warna dalam dinamika perkuliahan.
11. Teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2014, Tri, Radhit, Mika, Henk, Kemal, Bara, Fikran, Dhoni, Satrio, Firman, Devin, Rey, Haris, Jemmy, Catra, Tara, Naira, Retha, Nyanya, Asih, Thania, Uti, Cechil, Eka dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih atas kebersamaan, kebahagiaan, bantuan dan pengalaman yang luar selama masa perkuliahan.
12. Ekonomi Pembangunan 2015: Hanna, Sindy, Tama, Andrian, Audi, Iman, Grace dan Dani. Terimakasih telah menjadi teman sekelompok penulis saat masa perkuliahan.
13. Mayuko, Rey, Cecep, Shinta, Dita, Anti, Edis, Made, Faiz, Ucup, Salsa dan Mario. Terimakasih telah menemani penulis selama delapan tahun, dari SMA hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.

14. Terimakasih kepada teman terdekat penulis, Anas, Rere, Billa, Sarah, Indhira dan Mariany yang selalu mendukung dan menyemangati penulis, menjadi tempat untuk berbagi cerita, selalu memberikan candaan penting dan tidak penting, selalu memberikan bantuan ketika dibutuhkan, saling berbagi perhatian, memberikan berbagai pengalaman dan pelajaran hidup, selalu ada dalam susah dan senang serta menjadi keluarga kedua semasa perkuliahan.
15. Terimakasih Tami untuk bantuannya selama ini. Dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terimakasih karena selalu dapat menjadi tempat penulis untuk bertanya dan tidak pernah pelit ilmu.
16. *Last but not least, The Last Girls Standing*: Arini dan Gise yang berjuang bersama dengan penulis dalam menyelesaikan skripsi masing-masing. Terimakasih sudah menemani penulis dan sama-sama bisa menyelesaikan skripsi. Terimakasih sudah mau menjadi tempat keluh kesah penulis tentang proses pengerjaan skripsi dan selalu memberikan semangat serta saran bagi penulis.

Akhir kata, penulis kembali mengucapkan terimakasih dan penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat kepada para pembaca. Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat dikembangkan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Bandung, Juli 2019

Charamina Sulistiowati

DAFTAR ISI

ABSTRAK	V
ABSTRACT	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR TABEL	XII
DAFTAR GAMBAR	XIII
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4. Kerangka Pemikiran	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori.....	8
2.1.1. Teori Produksi.....	8
2.1.2. Desentralisasi Fiskal Daerah.....	9
2.1.3. <i>Budget Sustainability: Sustainable Budget Index</i>	11
2.2. Penelitian Terdahulu	13
2.3. Landasan Metodologi Penelitian	17
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN	21
3.1. Metode Penelitian	21
3.2. Deskripsi Objek Penelitian	24
3.3. Data dan Sumber Data	33
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Hasil	36
4.1.1. Perhitungan <i>Sustainable Budget Index</i> (SBI).....	36
4.1.2. Model Penelitian.....	37
4.1.3. Uji Asumsi Klasik.....	41
4.2. Pembahasan	44

BAB 5 PENUTUP.....	50
5.1. Kesimpulan.....	50
5.2. Implikasi Kebijakan	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
Lampiran 1. Tabel Pengeluaran Tidak Produktif Pemerintah Daerah	A-1
Lampiran 2. Tabel Pendapatan Rutin Pemerintah Daerah	A-2
Lampiran 3. Hasil Penghitungan <i>Sustainable Budget Index</i> 2006 Kelima Provinsi	A-3
Lampiran 4. Hasil Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas	A-4
Lampiran 5. Hasil Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas Model Tanpa DSBI.....	A-5
Lampiran 6. Hasil Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas Model Dengan DSBI	A-6
Lampiran 7. Hasil <i>Chow Test</i>	A-7
Lampiran 8. Hasil <i>Hausman Test</i>	A-8
Lampiran 9. Hasil Estimasi Model Tanpa DSBI (<i>Fixed Effect Model</i>).....	A-9
Lampiran 10. Hasil Estimasi Model Dengan DSBI (<i>Common Effect Model</i>).....	A-10
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	A-11

DAFTAR TABEL

Tabel 1. DBH SDA Pertambahan Umum	4
Tabel 2. PDRB, Investasi, Tenaga Kerja, Panjang Jalan Beraspal, Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur	26
Tabel 3. PDRB, Investasi, Tenaga Kerja, Panjang Jalan Beraspal, Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Selatan	27
Tabel 4. PDRB, Investasi, Tenaga Kerja, Panjang Jalan Beraspal, Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah Papua	29
Tabel 5. PDRB, Investasi, Tenaga Kerja, Panjang Jalan Beraspal, Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah Sumatera Selatan	31
Tabel 6. PDRB, Investasi, Tenaga Kerja, Panjang Jalan Beraspal, Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah Jawa Tengah	33
Tabel 7. Data dan Sumber Data	34
Tabel 8. Hasil Perhitungan SBI Tahun 2006	37
Tabel 7. Hasil <i>Chow Test</i>	38
Tabel 8. Hasil <i>Hausman Test</i>	38
Tabel 9. Hasil Estimasi Model Tanpa DSBI	39
Tabel 10. Hasil Estimasi Model dengan DSBI	41
Tabel 12. Uji Heteroskedastisitas Model tanpa DSBI (FEM)	42
Tabel 13. Uji Heteroskedastisitas Model dengan DSBI (CEM)	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Pendapatan Indonesia dari Industri Ekstraktif	3
Gambar 1. Peta Administratif Kalimantan Timur	25
Gambar 2. Peta Administratif Kalimantan Selatan	27
Gambar 3. Peta Administratif Papua	28
Gambar 4. Peta Administratif Sumatera Selatan	30
Gambar 5. Peta Administratif Jawa Tengah	32

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mineral merupakan salah satu bentuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Permintaan dunia terhadap sumber daya ini terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, standar hidup penduduk dan intensitas penggunaan komoditas mineral (Kesler, 2000). Jumlah penduduk dunia memiliki pengaruh yang besar pada permintaan mineral di masa depan. Diproyeksikan populasi penduduk dunia pada tahun 2050 akan mencapai 11 miliar penduduk, yang diprediksi akan berimplikasi pada peningkatan permintaan mineral sekitar 25 persen (Kesler, 2000). Standar hidup penduduk juga memengaruhi permintaan komoditas mineral di masa yang akan datang. Perubahan pola hidup masyarakat membuat permintaan batubara sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik meningkat. Hal ini karena kemajuan teknologi yang pesat membuat angka konsumsi listrik mengalami peningkatan.

Selain itu, mineral merupakan salah satu sumber daya yang menunjang setiap aspek kehidupan. Sumber daya tersebut merupakan bahan baku untuk dijadikan peralatan sehari-hari dari kaleng aluminium hingga *chip* untuk ponsel dan komputer. Artinya, pengolahan mineral memiliki potensi untuk menjadi sumber pendapatan dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara (Eggert, 2001). Pertumbuhan tersebut dapat disebabkan oleh produksi barang untuk ekspor atau konsumsi barang dan jasa dalam negeri. Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah negara yang perekonomiannya bergantung pada industri ekstraktif meningkat, dari 58 negara menjadi 81 negara (Dobbs, et al., 2013).

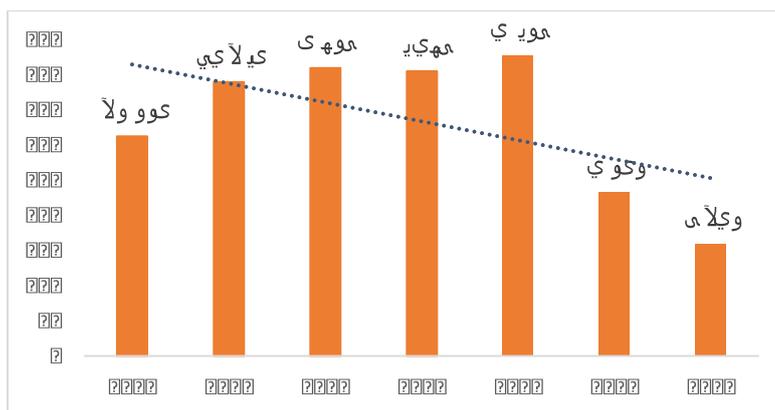
Di sisi lain, kekayaan mineral di sebuah negara ternyata tidak serta merta diikuti oleh kinerja perekonomian yang baik. Terdapat negara yang memiliki persediaan mineral yang melimpah namun gagal menunjukkan kinerja perekonomian yang lebih baik daripada negara yang tidak memiliki sumber daya mineral. Keadaan seperti ini disebut dengan *resource curse* (Li, 2013). Nigeria, Congo, Sierra Leone, Zambia, dan Colombia merupakan negara-negara yang mengalami *resource curse* (Amundsen, 2013). Hal ini ditandai oleh pembangunan ekonomi yang buruk dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah. Nigeria menerima pendapatan lebih dari 800 miliar dollar AS dari kegiatan ekstraksi mineral. Namun kemiskinan masih mengenai 60 persen dari lebih 170 juta penduduk Nigeria. Pendapatan Nigeria dari

kegiatan ekstraksi digunakan untuk pengeluaran yang tidak produktif dan korupsi (Chukwuma, 2015). Hal ini menyebabkan Nigeria terperangkap dalam *resource curse*.

Di sisi lain, negara-negara seperti Botswana, Norwegia, Australia, Chile dan Brazil merupakan contoh negara yang mempunyai kekayaan mineral dan berhasil mencapai kinerja perekonomian yang baik (Amundsen, 2013). Sumber daya mineral merupakan modal alam yang penting bagi Botswana. Mineral merupakan sepertiga komponen yang membentuk PDB Botswana dan merupakan komoditas utama untuk ekspor. Botswana mengelola pendapatan dari mineral dengan cara yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Botswana menggunakan pendapatan mineral untuk meningkatkan modal fisik seperti infrastruktur dan modal manusia. Penyediaan jalan beraspal di Botswana mengalami peningkatan, dari 23 km di tahun 1970 menjadi 2311 km di tahun 1990. Penyediaan layanan sambungan telepon meningkat dari 5000 sambungan di tahun 1970 menjadi 136000 sambungan di tahun 2001. Serta di tahun 1997 tingkat melek huruf perempuan sebesar 77 persen (Lange & Wright, 2002).

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai sumber daya mineral yang melimpah. Indonesia menjadi produsen batu bara terbesar kelima di dunia dengan menyumbang 5,8 persen dari produksi global dan merupakan produsen timah terbesar kedua di dunia (EITI Indonesia, 2015). Selain itu Indonesia memiliki jumlah cadangan emas dengan peringkat kelima dunia. Sumber daya ekstraktif menjadi pendorong utama dalam transisi perekonomian Indonesia (Natural Resource Governance Institute, 2015). Industri ekstraktif juga berkontribusi terhadap penerimaan negara dan penyediaan lapangan pekerjaan. Seperti yang ditunjukkan oleh grafik 1., penerimaan negara yang berasal dari industri ekstraktif pada tahun 2010 adalah 312,29 triliun rupiah dan meningkat menjadi 389,56 triliun rupiah pada tahun selanjutnya.

Gambar 1. Grafik Pendapatan Indonesia dari Industri Ekstraktif



Sumber: (EITI Indonesia, 2010-2016)

Peningkatan penerimaan negara dari industri ekstraktif disebabkan karena harga minyak dunia mengalami kenaikan dari US\$ 84,48/barrel pada tahun 2010 menjadi US\$ 105,19/barrel (EITI Indonesia, 2015). Dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 pendapatan Indonesia dari industri ekstraktif di tahun 2016 menurun sebesar 61 persen dari tahun 2012. Penurunan pendapatan yang terjadi disebabkan karena menurunnya harga minyak dan komoditas pertambangan dunia (EITI Indonesia, 2015).

Selain memiliki peran penting bagi perekonomian nasional, sektor pertambangan dan penggalan juga memiliki peranan penting dalam perekonomian wilayah terutama di daerah-daerah yang merupakan produsen terbesar hasil pertambangan umum. Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah merupakan lima provinsi produsen hasil pertambangan terbesar di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA) pertambangan (DJPK Kemenkeu, n.d.). DBH SDA pertambangan merupakan bagian dari transfer ke daerah yang berasal dari penerimaan mineral yang berasal dari iuran tetap (*land-rent*) dan iuran eksplorasi (*royalti*). Penerimaan tersebut dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu¹ untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi². Seperti yang disajikan pada tabel 1., sejak tahun 2006-2008 dana bagi hasil sumber daya alam berupa pertambangan umum yang diperoleh oleh kelima provinsi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, dana bagi hasil

¹ Provinsi penghasil mendapatkan persentase bagian sebesar 3,1 hingga 16 persen (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 2017)

² Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri untuk menyelenggarakan kegiatan pembangunan (Sujarwoto, 2015)

pertambangan umum Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan mengalami peningkatan. Sedangkan, pada 2009 dana bagi hasil pertambangan umum Papua dan Jawa Tengah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2008. Tahun 2010, DBH Kalimantan Timur, Papua dan Sumatera Selatan mengalami penurunan. Sebaliknya, tahun 2010 dana bagi hasil Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah mengalami peningkatan. Kalimantan Timur dari tahun 2011 hingga tahun 2016 memiliki DBH diatas 1 triliun rupiah. DBH provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 berada diatas satu trili un rupiah. Namun pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 800 miliar rupiah. Papua dan Sumatera Selatan dari tahun 2011 hingga tahun 2017 mendapatkan DBH yang berfluktuasi. Jawa Tengah merupakan provinsi di Pulau Jawa yang mendapatkan DBH sektor pertambangan terbesar. Tahun 2011 sampai tahun 201 4 Jawa Tengah mendapatkan DBH diatas satu miliar rupiah. Namun pada tahun 2015 dan 2016 DBH provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 626 juta dan 555 juta.

Tabel 1. DBH SDA Pertambangan Umum

Tahun	Kalmartan Timur	Kalimantan Selatan	Papua	Sumatera Selatan	Jawa Tengah
2006	994.032.001.970	433.351.639.860	349.567.728.840	84.728.993.320	235.657.280
2007	1.165.469.442.333	465.560.653.174	533.827.510.680	92.563.359.187	616.749.000
2008	1.344.178.571.466	562.927.015.547	1.374.153.977.560	102.998.242.888	678.472.372
2009	3.210.145.883.269	1.443.771.566.448	1.050.201.415.394	309.749.668.683	249.030.797
2010	2.903.232.736.200	1.739.697.371.100	892.325.307.100	264.120.683.300	296.665.800
2011	4.131.959.296.778	2.030.168.616.968	1.318.434.029.652	516.721.954.050	1.432.115.592
2012	6.666.995.512.400	2.209.014.813.400	764.422.397.200	417.522.556.000	2.731.965.400
2013	6.393.044.418.300	2.798.236.712.000	798.424.187.100	803.734.972.700	6.681.248.500
2014	5.714.715.053.554	3.818.589.264.072	1.840.874.840.640	1.505.243.031.673	11.288.643.671
2015	2.256.727.600.000	1.052.249.363.000	444.538.203.000	317.975.823.000	626.159.000
2016	1.726.351.335.000	804.020.456.000	345.423.860.000	248.225.777.000	555.781.000

Sumber: (DJPK Kemenkeu, n.d.)

Dalam sistem otonomi, pemerintah daerah merupakan pemilik sumber daya alam, sehingga berhak menerima pembayaran atas pemanfaatan sumber daya mineral, pemerintah daerah juga berkewajiban menggunakan pendapatan tersebut secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lange & Wright, 2002). Mengingat mineral merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, pemanfaatan penerimaan mineral harus dilakukan secara tepat (Wright & Czelusta, 2004), dengan mengalokasikannya untuk pengeluaran yang produktif. Hal ini dibutuhkan agar tidak terjadi hal-hal seperti yang dialami oleh Nigeria, Congo, Sierra Leone, Zambia dan Colombia (*resource curse*).

Di Indonesia pengalokasian pendapatan mineral yang bijaksana semakin dibutuhkan karena sudah ada daerah yang menunjukkan indikasi *resource curse*. Perekonomian Kalimantan Timur bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian, dimana kontribusinya sebesar 48,43 persen dari keseluruhan PDRB. Namun sektor tersebut hanya menyerap tenaga kerja sebesar 8,16 persen dan 6,42 persen penduduknya masih berada dalam garis kemiskinan. Indikasi serupa juga ditunjukkan oleh Papua. Meskipun Papua merupakan daerah yang kaya mineral dengan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB sebesar 42,08 persen. Kinerja ekonomi dan sosial tidak terlalu baik dimana sektor tersebut hanya menyerap tenaga kerja sebesar 1,53 persen dan sebesar 29,20 persen penduduknya masih berada dalam garis kemiskinan (Wibowo & Parmansyah, 2018).

Sustainable Budget Index (SBI) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu wilayah mengelola pendapatan dari industri ekstraktif dengan cara yang tepat (Nugraheni, Mokoginta, & Asfari, 2015). Botswana merupakan negara yang sudah menerapkan penggunaan SBI. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lange & Wright (2002) menunjukkan bahwa Botswana memiliki nilai SBI dibawah satu yang berarti pengeluaran pemerintah telah dilakukan secara berkelanjutan karena dibiayai sepenuhnya dari pendapatan selain mineral.

Alokasi penerimaan mineral di Botswana yang dilakukan secara bijaksana berhasil mengubah perekonomian negara tersebut dari negara termiskin menjadi negara dengan perekonomian menengah ke atas. Hal ini terjadi karena SBI dibawah satu mengindikasikan pendapatan mineral diinvestasikan kembali ke pengeluaran yang produktif seperti investasi dalam modal fisik dan modal manusia. Akumulasi modal fisik dan modal manusia merupakan faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi (Stern, 1991). Investasi dalam modal manusia dapat meningkatkan produktivitas pekerja yang kemudian dapat meningkatkan output dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Lucas Jr., 1988). Investasi modal fisik seperti infrastruktur jalan beraspal memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu wilayah karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dunia usaha (Suroso, 2015). Kemudahan pengiriman barang, jasa dan tenaga kerja dari dalam maupun luar daerah akan meningkatkan perekonomian wilayah tersebut.

1.2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Suatu daerah yang memiliki kekayaan mineral seharusnya dapat menunjukkan kinerja perekonomian yang lebih baik, karena daerah mampu mengelola pendapatan mineral dan mengubahnya menjadi investasi untuk meningkatkan modal fisik dan

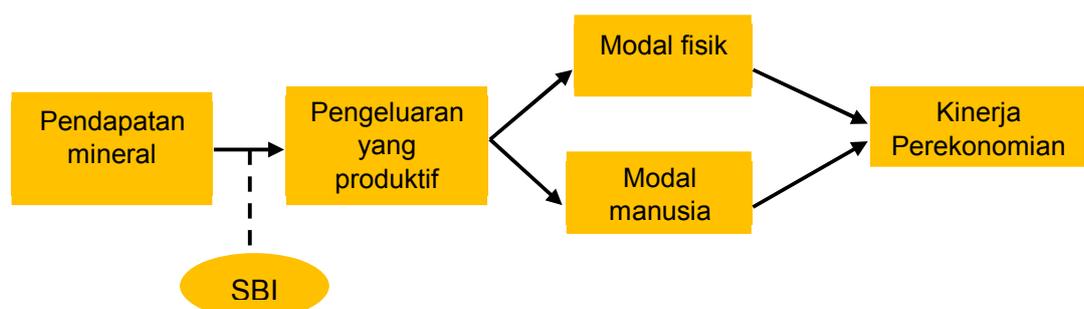
modal manusia. Kalimantan Timur dan Papua merupakan daerah yang kaya mineral. Hal tersebut terlihat dari kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB tahun 2016 sebesar 48,43 persen dan 42,08 persen. Meski kontribusi sektor tersebut besar, namun sektor pertambangan dan penggalian di Kalimantan Timur dan Papua ternyata hanya menyerap tenaga kerja sebesar 8,16 persen dan 1,53 persen dan 6,42 persen serta 29,20 persen penduduknya masih berada dalam garis kemiskinan. Ditambah lagi, indeks pembangunan manusia di kedua daerah tersebut yang rendah yaitu 73 dan 56. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah merupakan daerah-daerah yang kaya mineral. Oleh karena itu, perlu diketahui apakah pendapatan dari mineral digunakan untuk pengeluaran yang produktif di kelima provinsi tersebut, sehingga dalam jangka panjang dapat memicu perekonomian wilayah. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Dengan menggunakan alokasi SBI apakah pemerintah daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah telah mengalokasikan penerimaan mineral untuk sektor yang produktif?
2. Jika ya, bagaimana kaitannya dengan kinerja perekonomian dalam jangka panjang di kelima provinsi tersebut.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memanfaatkan *sustainable budget index* guna menjelaskan penyebab mengapa sebuah wilayah meski kaya sumber daya mineral, namun memiliki kinerja perekonomian yang buruk. Hasil dari penelitian ini memberikan informasi bagaimana pengelolaan pendapatan mineral yang bijaksana dapat berkontribusi bagi kinerja perekonomian suatu wilayah.

1.4. Kerangka Pemikiran



Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah merupakan daerah kaya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Hal ini terlihat dari penerimaan pendapatan mineral yang besar. Pendapatan tersebut diharapkan mampu mendorong kinerja perekonomian wilayah dalam jangka panjang, dengan cara mengalokasikannya untuk pengeluaran yang produktif. *Sustainable budget index* digunakan untuk melihat apakah pendapatan mineral dialokasikan untuk pengeluaran yang produktif atau untuk pengeluaran yang tidak produktif. SBI dikatakan baik apabila pengeluaran pemerintah yang tidak produktif dibiayai dari pendapatan selain mineral.

Modal fisik dan modal manusia berkontribusi dalam mendorong kinerja perekonomian suatu wilayah. Untuk menghasilkan modal manusia yang berkualitas, pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang penting. Pendidikan dan kesehatan dapat mewakili kualitas tenaga kerja dengan cara meningkatkan keterampilan dan meningkatkan kesehatan sehingga akan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif. Selain modal manusia, modal fisik seperti infrastruktur diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Keberadaan infrastruktur yang baik, seperti jalan sangat penting karena mampu mendukung kelancaran aktivitas perekonomian. Pendapatan mineral yang dialokasikan untuk investasi di sektor produktif berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Modal fisik dan modal manusia dikatakan pengeluaran yang produktif karena dalam jangka panjang akan berkontribusi dalam meningkatkan kinerja perekonomian suatu wilayah.